

Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Disiplin Nasional

Chairuddin P. Lubis

Universitas Sumatera Utara

Pendahuluan

GBHN 1993 telah menetapkan sasaran umum PJP II ialah terwujudnya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram, sejahtera lahir dan batin dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Selanjutnya GBHN juga mengamanatkan bahwa pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk pendidikan di daerah terpencil, sehingga bangsa Indonesia lebih siap memasuki tahap tinggal landas dan lebih tangguh memasuki era kebangkitan nasional kedua.

Dengan ditetapkannya titik berat pembangunan pada bidang ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan makin menduduki peranan yang sangat penting dan strategis. Sejalan dengan hal tersebut, maka peningkatan pemerataan pada perguruan tinggi di seluruh wilayah tanah air sebagai perwujudan Wawasan Nusantara, dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan memperhatikan potensi perguruan tinggi secara proporsional.

Dengan demikian potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap perguruan tinggi dapat dikembangkan sepenuhnya, termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan dilandasi pada 4 strategi kebijakan dasar pendidikan, yakni pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan, dan peningkatan efisiensi internal serta efektivitas pengelolaan pendidikan. Namun demikian perlu diperhatikan juga agar upaya pemerataan tidak menurunkan daya saing pendidikan tinggi nasional terhadap dunia luar dalam era globalisasi yang berada di ambang pintu.

GBHN 1993 juga menegaskan bahwa Pendidikan Tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional serta kemampuan kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, juga mampu melahirkan manusia yang berjiwa penuh pengabdian, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Misi khusus pendidikan tinggi adalah (1) mempersiapkan kader pemimpin bangsa dan (2) menyiapkan sumberdaya manusia yang berkemampuan lanjut di masa depan atau dengan wawasan kepemimpinan dan wawasan keunggulan.

Wawasan kepemimpinan dengan ciri (a) orientasi ke masa depan, (b) landasan pola pikir ilmiah, (c) landasan pola kerja yang efektif dan efisien. Wawasan kepemimpinan harus mampu mengembangkan tiga hal: wawasan nasional, visi bangsa dan kemampuan kepemimpinan.

Dalam pada itu, era globalisasi ditandai oleh perubahan yang sangat cepat, di mana pasar makin terbuka yang berarti persaingan pun makin tajam. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem ekonomi yang terbuka dan sebagai anggota AFTA,

APEC dan WTO maka Indonesia merupakan bagian dari pasar dunia. Dalam pasar dunia yang terbuka kata kunci agar dapat hidup dan berkembang ialah "kemampuan bersaing". Masyarakat yang tidak mampu bersaing akan tenggelam ditelan gelombang persaingan. Persaingan itu sendiri ditentukan oleh kemampuan atau kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh sebab itu tantangan utama bangsa kita dalam era pasar bebas ini ialah bagaimana meningkatkan kualitas SDM?

Sistem Pendidikan

Tujuan Pendidikan Nasional

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menetapkan bahwa Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia agar lebih maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam PJP II yang berlangsung sejak tahun 1994 sampai 2019 yang akan datang, rasa cinta tanah air yang melandasi kesadaran kebangsaan, semangat pengabdian, dan tekad untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik harus terus dibangkitkan dan dipelihara sehingga berkembang menjadi sikap mental dan sikap hidup masyarakat yang mampu mendorong percepatan proses pembangunan di segala aspek kehidupan bangsa guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Dalam pada itu tujuan pendidikan nasional ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi pada masa depan.

Tujuan Pendidikan Tinggi

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, tujuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi seperti Universitas dan Institut ialah :

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/ atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pendidikan tinggi berpedoman kepada:

- a. Tujuan pendidikan nasional
- b. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
- c. Kepentingan masyarakat, serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

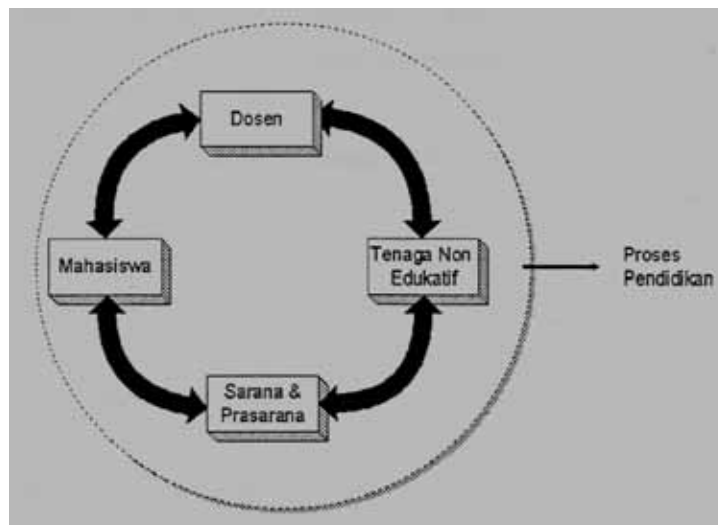
Perguruan Tinggi

Pada setiap perguruan tinggi ada tiga unsur yang perlu mendapat perhatian.

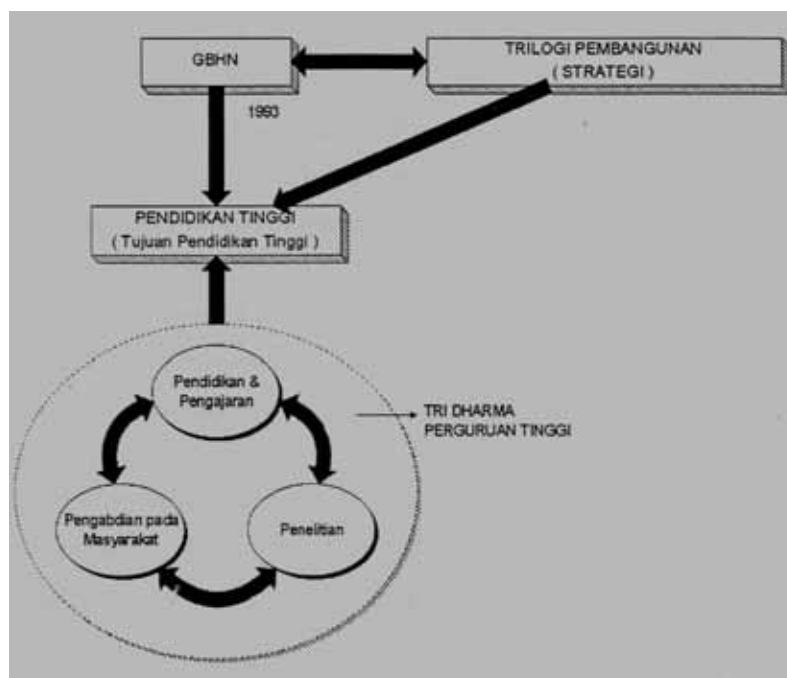
1. Wilayah, dalam hal ini adalah kampus universitas.
2. Unsur pemerintah, dalam hal ini adalah tenaga edukatif dan non edukatif dan
3. Mahasiswa, sebagai masyarakat terbesar di lingkungan kampus.

Ketiga unsur ini tidak boleh bertentangan, bila ketiga unsur ini terintegrasi dan harmonis, maka suasana/lingkungan akan sangat menolong perguruan tinggi dalam mengelola perguruan tinggi dengan misi mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai jati diri.

Dalam pelaksanaan pendidikan, perguruan tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana diperlihatkan Gambar 1.



Gambar 1



Gambar 2

Dalam hal ketiga komponen tadi (Gambar 1) kait-berkait dalam proses pendidikan. Ketimpangan dalam satu komponen akan mempengaruhi proses pendidikan.

Dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi, keterkaitan antara landasan dan strategi pembangunan dengan Tri Dharma perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar ini memperlihatkan bahwa ketiga Dharma Perguruan Tinggi tersebut saling kait mengkait satu sama lainnya. Kepincangan dalam salah satu dharma jelas akan menghambat tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

Tri Dharma perguruan Tinggi

Dharma Pendidikan dan Pengajaran

Dalam kaitannya dengan pengembangan dharma pendidikan dan pengajaran (akademik), ada beberapa masalah yang timbul, yaitu:

1. Kurikulum Perguruan Tinggi yang berlaku pada saat ini dirasa belum menjawab tantangan global yang memerlukan sumber daya manusia yang unggul. Masih rendahnya tingkat keterpaduan antara kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler sehingga menimbulkan in efisiensi.
2. Kondisi perangkat keras dan lunak di Perguruan Tinggi yang sudah tidak memadai untuk mendukung proses pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Lemahnya tingkat koordinasi dan keterpaduan antar lembaga yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan.
4. Pengaruh globalisasi yang tidak dapat dihindarkan.
5. Belum terciptanya iklim yang kondusif agar gagasan dan pendapat benar-benar didasarkan atas pemikiran rasional yang didukung oleh bukti yang biasa ditinjau kebenarannya.
6. Masih timpangnya komposisi keahlian antara ilmu sosial dan saintek.

Pembahasan

1. Bertitik tolak pada tujuan Pendidikan Tinggi maka kurikulum perlu terus dikembangkan secara dinamis dengan memperhatikan kepentingan dan keunggulan komparatif daerah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan ilmu pengetahuan perlu diarahkan untuk mendukung penguasaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan secara mendalam serta mendorong pengembangan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan langsung dengan perkembangan Iptek untuk menciptakan keunggulan kompetitif.

Disamping pengembangan program yang berkaitan dengan kurikulum, pengembangan program kemahasiswaan diharapkan agar hasil dari pendidikan tinggi memiliki jiwa kepemimpinan, berdedikasi tinggi, memiliki ketahanan fisik dan mental serta senantiasa menjadi makhluk yang mengabdikan dan berbakti kepada Tuhan.

2. Dalam upaya membawa mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kegiatan pendidikan perlu penyiapan dan penggunaan sarana dan prasarana yang sesuai Perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, media pengajaran, teknologi

pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya dikembangkan dan disebarluaskan untuk membantu terselenggaranya program pendidikan yang efektif dan efisien. Disamping itu ketrampilan dosen dalam proses belajar mengajar, secara berencana dan berkesinambungan perlu ditingkatkan, sehingga transfer ilmu dapat berjalan secara optimal.

Dalam kondisi ini suasana pengajaran yang dialogis lebih ditonjolkan, sehingga komunikasi dua arah biasa berjalan dengan baik.

Untuk meningkatkan kualitas ilmu yang diberikan, sesuai dengan perkembangan IPTEK dan pembangunan, diperlukan kualitas dosen yang memadai. Karenanya jenjang pendidikan lanjutan bagi dosen (S2, S3), perlu selalu dimasyarakatkan.

Tidak kalah pentingnya ialah keteladanan dosen dalam perilaku sehari-hari, sebagai seorang pendidik.

Dengan keterbatasan dana pemerintah dan peraturan yang ada, maka kondisi di atas banyak mengalami hambatan. Fasilitas perpustakaan (terutama jenis dan jumlah) terasa sangat kurang mendukung dalam kelancaran proses belajar mengajar. Program-program S2 dan S3 pun, tidak dapat diikuti oleh sebagian besar tenaga dosen, karena keterbatasan dana, di samping program tersebut hanya dapat dilaksanakan pada beberapa Universitas/Institut saja.

3. Keunggulan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas kepakaran SDM yang berkemampuan lanjut. Mereka diharapkan mampu melakukan penelitian yang mendasar dan mendalam baik dalam rangka pengembangan IPTEK maupun dalam rangka pemecahan masalah pembangunan.

Kemampuan bangsa Indonesia menguasai IPTEK perlu terus ditingkatkan agar mampu membudidayakan sumber-sumber alam, serta diarahkan untuk pengembangan keunggulan kompetitif. Untuk sampai pada taraf tersebut, maka mahasiswa sebagai generasi penerus memerlukan penangan-penanganan yang komprehensif.

Kegiatan-kegiatan riset institusional, riset akademik, kursus dasar penelitian, LKTI, LKIP, Lomba Karya Widya Utama, merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yang memperlihatkan peningkatannya dari waktu ke waktu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam aktualisasi inilah maka wawasan kebangsaan, wawasan keterbukaan dan wawasan kecendekiawan perlu dikembangkan. Wawasan keterbukaan akan menghindarkan diri dari perangkap wawasan yang sempit. Sedangkan wawasan kecendekiawan akan menuntut kemampuan mensintesis dan mengadakan panduan perspektif dari berbagai pendapat, argumentasi yang berbeda-beda.

Berbagai kegiatan akademik ini, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.

Kegiatan extra kurikuler baik yang tingkat regional maupun nasional, seringkali dilaksanakan bersamaan waktunya dengan ujian-ujian semester. Dua kegiatan

yang bersamaan seperti ini akan merugikan, karena tidak dapat terlaksananya salah satu di antaranya. Untuk hal tersebut kiranya perlu dilaksanakan koordinasi dalam Perguruan Tinggi terkait.

4. Salah satu unsur dalam pendidikan dan pengajaran di Perguruan Tinggi adalah Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Melalui suatu proses transformasi, mahasiswa disiapkan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional serta kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjiwa penuh pengabdian, memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Dipandang dari filsafat Pancasila, jati diri mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa adalah ciptaan Tuhan.
 - 2) Mahasiswa didudukan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
 - 3) Mahasiswa Indonesia merupakan unsur yang tak terpisahkan dari negara dan bangsanya.
 - 4) Mahasiswa yang mampu menghargai pendapat orang lain.
 - 5) Mencita-citakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.
 - 6) Pengabdian dan pengembang kebenaran.
5. Dalam rangka memenuhi kebutuhan industrialisasi dan meningkatkan daya saing bangsa menghadapi ekonomi pasar yang makin terbuka, maka penanganan bidang akademik merupakan suatu keharusan bagi kita untuk memperhatikan keperluan akan penguasaan IPTEK yang merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan akademik diperlukan tidak hanya penguasaan ilmunya tetapi juga pemeliharaan, penerapan, pengembangan dan penciptaan IPTEK itu sendiri dalam rangka menunjang pengembangan industri Indonesia.

Perkembangan IPTEK yang pesat terutama di bidang teknologi informasi yang mempercepat proses globalisasi dikhawatirkan juga dapat membawa dampak negatif terhadap nilai-nilai luhur budaya kita, terutama di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, calon-calon pemimpin bangsa.

Dalam hubungan ini kiranya para ahli pendidikan dan pakar ilmu sosial di Perguruan Tinggi khususnya, jelas ditantang untuk dapat melakukan pengkajian dan pengajaran di Universitasnya masing-masing agar generasi muda khususnya para mahasiswa ini mempunyai daya tangkal yang tangguh terhadap nilai-nilai baru yang negatif.

Kebijaksanaan

Dalam menuangkan beberapa kebijaksanaan strategi untuk meningkatkan kemampuan akademis maka dipergunakan beberapa asas sebagai berikut:

- Peningkatan kemampuan akademis/pendidikan merupakan bagian yang terpadu dari upaya pertumbuhan Perguruan Tinggi dengan selalu menjaga stabilitas kampus.
- Berorientasi ke masa depan dan kepentingan bangsa.

- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan masalah-masalah yang ada dalam suatu Perguruan Tinggi dan dengan memperhatikan tantangan global dari atas diusulkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi secara khusus perlu menentukan muatan-muatan lokal sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum nasional sesuai keunggulan komperatif dan pengembangan daerah. Perlu lebih dikembangkan kegiatan ekstra kurikuler sesuai Pola Pengembangan Kemahasiswaan agar terbentuk figur hasil didik: manusia analitis, kritis, inovatif, rasional yang diperlukan oleh kepemimpinan masa depan.
2. Strategi, pendidikan hendaknya diarahkan kepada:
 - 1) Sarana, prasarana, dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan (terutama pengetahuan dasar) perlu makin didaya gunakan dan ditingkatkan secara bertahap.
 - 2) Perlu ditingkatkan kerjasama antar lembaga, serta menciptakan hubungan yang saling mengisi.
 - 3) Perlu ditingkatkan jumlah lulusan S2, S3 dan Guru Besar disamping pendidikan-pendidikan lain dalam bidang pengajaran.

Dengan demikian, dunia pendidikan tinggi benar-benar semakin dapat dikembangkan sebagai sumber penyediaan tenaga ahli yang berkualitas tinggi.

3. Menanamkan jati diri civitas akademika melalui berbagai kegiatan dengan tujuan akhir menciptakan peserta didik berjati diri sebagai bangsa Indonesia.

Perlunya para ilmuwan IPTEK, di Perguruan tinggi khususnya memiliki semangat tinggi menjemput penguasaan perkembangan IPTEK agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam menghadapi globalisasi dan perlunya para pakar pendidikan dan pakar ilmu sosial melakukan pengkajian dan pengajaran dalam rangka menangkal pengaruh nilai-nilai baru yang negatif dengan pesatnya perkembangan IPTEK di bidang informasi yang mengglobal.

Dharma Penelitian

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. (UU No. 2 Tahun 1989)

Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

Masalah dan Situasi Lingkungan

1. Kemampuan dasar.
Kemampuan dasar untuk meneliti masih bervariasi, hal ini disebabkan karena jenjang pendidikan yang dicapainya berbeda-beda.
Kesempatan untuk mengadakan penelitian sering terhambat oleh tugas-tugas seperti beban tugas mengajar yang masih cukup besar.

2. Peluang
Keterbatasan memperoleh kesempatan mengajukan proposal yang dapat disetujui, dapat mengurangi dorongan untuk mengajukan proposal penelitian selanjutnya. Tawaran mengejukan proposal penelitian antara penelitian sosial dan non sial belum berimbang.
3. Dana
Sumber dana yang ada di perguruan tinggi maupun di PIKTI tersedia terbatas.
4. Keterbatasan fasilitas, baik sarana maupun prasarana di beberapa perguruan tinggi kurang mendukung kegiatan penelitian.

Pemecahan Masalah

Di dalam usaha menumbuhkan terciptanya pemerataan dalam arti perluasan kegiatan penelitian, peningkatan mutu serta pelaksanaan yang efisien, efektif, produktif dan relevan perlu diambil beberapa langkah operasional antara lain

1. Kemampuan untuk melaksanakan kegiatan penelitian tidak hanya terbatas pada tingkat kemampuan intelektual namun mencakup kemauan, kesediaan dan memegang etik ilmu pengetahuan.
Oleh karena itu perlu adanya kesempatan dan dorongan untuk meningkatkan jenjang pendidikan bagi para dosen dan mengadakan atau mengikutsertakan dalam beerbagai latihan, kursus penelitian baik yang diadakan oleh perguruan tinggi sendiri maupun program kerjasama atau bantuan seperti yang dilakukan dalam bentuk PAU di beberapa perguruan tinggi.
2. Perlu adanya dorongan (motivasi) dari pimpinan kepada dosen muda untuk melakukan penelitian.
3. Meningkatkan peran atau aktivitas lembaga penelitian di masing-masing perguruan tinggi.
4. Adanya keseimbangan dalam melaksanakan tugas Tri Dharma.
5. Perlu adanya kebijaksanaan dari pembuat keputusan untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada dosen muda atau perguruan-perguruan tinggi di daerah.
6. Meningkatkan jumlah dana yang dapat dikelola oleh perguruan tinggi atau usaha-usaha pemberian dari Dikti dan bantuan dari instansi lain maupun masyarakat.
7. Kegiatan-kegiatan penelitian hendaknya dapat dilanjutkan atau dikembangkan atau menghindarkan penelitian yang terpotong-potong.
8. Perlu adanya hasil penelitian yang dapat disebarluaskan kepada beberapa perguruan tinggi. Hal ini diharapkan dapat menghindarkan penelitian yang berulang-ulang dan sebaliknya penelitian yang telah dilakukan, hasilnya dapat dijadikan acuan penelitian lebih lanjut baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

9. Perlu adanya peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan fasilitas dapat menggunakan fasilitas perguruan tinggi yang lain.
10. Perlu adanya peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi, sehingga warga perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan fasilitas dapat menggunakan fasilitas perguruan tinggi yang lain.
11. Di kalangan mahasiswa di samping penelitian-penelitian membuat skripsi perlu dikembangkan adanya sistem partisipasi dalam proyek-proyek penelitian yang dilakukan oleh para dosen.

Dharma Pengabdian Pada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat pada hakikatnya membantu masyarakat agar masyarakat mau dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian azas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan azas kemanusiaan yang menekankan pada usaha pengembangan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pengabdian kepada masyarakat harus dilandasi pada kepercayaan dan kemampuan dan kekuatan masyarakat itu sendiri.

Bentuk-bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat

Ada beberapa bentuk pengabdian kepada masyarakat, antara lain:

1. Pengembangan Desa Binaan
Ada beberapa keuntungan pengembangan desa binaan antara lain, dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu, serta dapat memecahkan masalah secara tuntas.
2. Pelatihan di kampus dan luar kampus.
Pelatihan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan akan mampu dengan segera mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan.
3. Local verification trial.
Local verification trial akan mampu menyatukan kegiatan penelitian dengan pengabdian masyarakat. Masyarakat dapat melihat secara langsung cara menghasilkan suatu teknologi karena langsung dilibatkan.
4. Pelaksanaan KKN .
5. Dan lain sebagainya.

Masalah dan Kendala Pengabdian Pada Masyarakat

Beberapa masalah dan kendala dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat antara lain:

1. Pelaksana yang merasa lebih dari masyarakat. Dosen maupun mahasiswa yang melaksanakan pengabdian pada masyarakat sering menganggap masyarakat tersebut bodoh. Akibatnya terjadi pemaksaan pendapat dari dosen dan mahasiswa kepada masyarakat.

2. Keragaman budaya yang berakibat terjadinya perbedaan penilaian terhadap sesuatu atau perilaku tertentu dari masyarakat setempat ataupun para pelaksana.
3. Kekurangtahuan pelaksana dalam berkomunikasi, sehingga dapat menimbulkan kesalah pengertian antara masyarakat dan pelaksana dan dapat berdampak negatif terhadap program, masyarakat maupun pelaksana.
4. Kemiskinan dan kekurangtahuan masyarakat, sehingga sulit membangkitkan motivasi untuk diajak maju bersama.
5. Kurangnya koordinasi antar dan dalam institusi pelaksana.
6. Keterbatasan dana.
7. Kurangnya konsistensi, evaluasi dan umpan balik dari pelaksana program.

Dengan memahami kendala yang ada dan yang telah disebutkan di atas, seyogyanya hal tersebut dijadikan tantangan dalam upaya mendidik diri pelaksana sebelum dan selama program berjalan.

Pemecahan Masalah

Dengan tekad menjadikan kendala sebagai tantangan, maka dituntut para pelaksana memahami dan mampu manajemen program dengan baik antara lain melakukan studi pendahuluan, koordinasi dengan instansi terkait.

Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Disiplin Nasional

Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlaku, yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir dan batin, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Disiplin, di satu sisi, adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggungjawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar. Sikap dan perilaku ini dianut berdasarkan keyakinan bahwa hal itulah yang benar, dan keinsyapan bahwa hal itu bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Di dalamnya terkait dengan kemauan dan kemampuan seseorang menyesuaikan interest dan mengendalikan dirinya untuk sesuai dengan norma, aturan, hukum, kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial budaya setempat. Di sisi lain disiplin adalah alat untuk menciptakan perilaku dan tata hidup tertib manusia sebagai pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat. Dengan demikian disiplin berarti hukuman atau sanksi yang berbobot mengatur perilaku manusia.

Sementara itu disiplin nasional adalah sikap mental seluruh warga dari suatu bangsa yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi/kelompok, berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlaku, yang dilakukan secara sadar dan ikhlas baik lahir maupun batin, sehingga tumbuh keyakinan bahwa tujuan nasional hanya dapat dicapai disiplin nasional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sangat relevan dengan gerakan disiplin nasional. Sebab, sejak dini perguruan tinggi telah dituntut secara konsekuen membudayakan disiplin.

Sivitas akademika perguruan tinggi senantiasa dituntut memahami, menyadari, dan melaksanakan disiplin pribadi secara ikhlas. Oleh karena itu dosen harus memiliki budaya tertib, misalnya tertib memberikan kuliah sesuai dengan kurikulum dan silabus yang ditentukan konsorsium. Sebagaimana telah disinggung di atas agar dapat menjadi dosen berhasil dituntut disiplin kerja yang tinggi. Misalnya seorang dosen harus mempunyai budaya tertib mengumpulkan "kredit point" untuk digunakan sebagai bukti prestasi ketika akan naik pangkat. Demikian juga tertib menggunakan waktu dalam memberikan kuliah sebab kelas dan ruang yang sama dipergunakan secara bergantian (antri).

Mahasiswa pun harus mengikuti kuliah dengan tertib, seperti datang tepat waktu dan aktif kuliah minimal 75%. Dalam hal pengerjaan tugas terstruktur dan mandiri seorang mahasiswa harus dapat melakukannya dengan tertib dan menggunakan waktu yang tersedia secara proporsional. Sebab tugas-tugas tersebut diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa apakah ia akan melaksanakan atau tidak.

Dalam kehidupannya di kampus sivitas akademika harus mengamalkan budaya bersih. Tanpa kesadaran bersama menjaga kebersihan, kampus tidak akan menjadi lingkungan nyaman untuk mengamalkan tri dharma perguruan tinggi. Sebagai contoh, dosen, pegawai, dan mahasiswa kedokteran di laboratorium harus memiliki budaya bersih. Jika tidak, maka tugas-tugas yang akan dilakukan bisa terkendala atau malah menimbulkan bahaya. Dalam pelaksanaannya budaya bersih ini tidak diawasi oleh siapapun kecuali oleh pelaku/individu sendiri.

Dalam pada itu, budaya kerja di perguruan tinggi harus melembaga dan memasyarakat dalam diri setiap individu sivitas akademika. Tanpa budaya kerja yang melembaga dan memasyarakat sebuah perguruan tinggi akan gagal menjalankan tri dharma yang diembannya. Di atas telah disinggung, tanpa budaya kerja yang berdisiplin tinggi seseorang dosen atau pun mahasiswa tidak akan dapat mencapai hasil yang optimal. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi secara implisit merupakan pengamalan budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja.

Meskipun demikian perguruan tinggi adalah bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, dan Pendidikan Nasional itu sendiri tidak terlepas dari lingkungannya. Oleh sebab itu pembudayaan disiplin nasional dari lingkungan perguruan tinggi tidak dapat berjalan sendiri. Dengan kata lain, masyarakat perguruan tinggi pada satu sisi memang sangat dituntut berdisiplin tinggi mengamalkan tri dharmanya. Tetapi pada sisi lain mereka tidak lepas dari kondisi dan budaya masyarakat di luar perguruan tinggi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pembangunan SDM di Perguruan Tinggi mengenal tri dharma Perguruan Tinggi dan dalam operasionalnya pendidikan tinggi kita mengamalkan sistem SKS, dimana dosen dan mahasiswa secara relatif diberi "kebebasan" mengatur cara dan jam kerja melaksanakan tugasnya masing-masing. Tanpa disiplin pribadi yang tinggi di kalangan sivitas akademika, maka

adalah mustahil sebuah perguruan tinggi mampu melahirkan alumni yang dapat dikategorikan sebagai SDM berkualitas.

Sungguhpun sebuah Perguruan Tinggi telah melahirkan alumni yang berkualitas dengan disiplin yang tinggi belum merupakan jaminan bahwa alumninya akan menjadi anggota masyarakatnya yang berdisiplin tinggi, apalagi menjadi penggerak disiplin dalam lingkungannya yang tidak atau belum mempunyai disiplin.

Sebagai satu contoh, seorang lulusan Perguruan Tinggi yang berhasil dengan *cum laude* karena disiplin yang tinggi dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di AS. Dalam waktu kurang dari 2 tahun dia berhasil memperoleh gelar magister dengan *cum laude* pula. Akan tetapi setelah bekerja di satu kantor/instansi yang tidak memberi penghargaan kepada pegawai yang disiplin, maka secara lambat atau cepat dia akan ikut menjadi pekerja yang tidak disiplin. Atau setidaknya-tidaknya menjadi pekerja yang frustrasi.

Sebaliknya seorang anak SMTA yang kurang berdisiplin, dengan kondisi fisiknya yang bagus dan kemauan yang besar dia melamar masuk Angkatan Bersenjata. Setelah lulus dan mengikuti pendidikan selama lebih kurang 3 tahun dia bekerja di kesatuannya yang penuh disiplin. Sudah barang tentu bukan hal yang luar biasa jika dia pun menjadi seorang prajurit atau perwira yang boleh dinilai sebagai teladan dalam berdisiplin.

Penutup

Sejalan dengan itu, dunia telah memasuki era globalisasi atau sering disebut sebagai era pasca industri, tetapi pada waktu dan masyarakat yang sama masih terdapat masyarakat yang hidup dalam pra-agraris, dan keadaan seperti itu masih terdapat dalam masyarakat kita. Malahan dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat kita masih belum mampu dan dapat memasuki dan dibawa ke era globalisasi itu. Masyarakat kita memang telah banyak yang mampu mengkonsumsi hasil industri, tetapi sebagai konsumen masih banyak yang hidup dan berbudaya dalam sistem nilai agraris. Masih banyak pula masyarakat kita yang telah bekerja di sektor industri dan jasa tetapi masih berfikir tradisional, belum senantiasa ingin berprestasi tinggi, belum merasa perlu bekerja keras dan mempunyai disiplin. Padahal dalam era globalisasi dan industrialisasi, suatu bangsa atau masyarakat harus memiliki budaya disiplin, seperti disiplin dalam melaksanakan pekerjaan, menepati janji, menjalankan peraturan, dan disiplin dalam berlalu lintas.

Disiplin haruslah merupakan budaya bangsa yang penempaannya dimulai sejak usia dini. Dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan formal, pendidikan informal dan masyarakat.

Gerakan disiplin nasional yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1995 ketika memperingati hari kebangkitan nasional yang lalu hendaklah disahuti dengan serius, benar dan bersungguh-sungguh. Menyambut gerakan ini tidak cukup hanya dengan menyebarkan slogan-slogan atau himbauan-himbauan. Tetapi hendaklah dilakukan usaha-usaha yang serius, sungguh-sungguh, konsekuwen dan terus-menerus di semua aspek kehidupan berbangsa.

Referensi

Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi

Dipo Alam, *Sumber Daya Manusia dan Kemampuan Teknologi dalam Pembangunan jangka Panjang II*, Manajemen dan Usahawan Indoensia, No. 5/1991

Pemdasu, *Gerakan Disiplin Nasional*, Medan, 1995.

Mayjen TB Silalahi, *Manusia dan Uang*, Makalah Seminar Sumber Daya Manusia Dan Keuangan sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi Indonesia, Medan 1-2 Desember 1992

Pola Ilmiah Pokok Universitas Sumatera Utara

Statuta Universitas Sumatera Utara

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989.

Bahan Diskusi Calon Penatar P4 Tingkat Nasional/Khusus Bagi Pimpinan PTN dan IAIN Angkatan ke-XV Tahun 1995/1996